



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD HILMI
11327105899

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul *Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Umum*, yang ditulis oleh;

Nama : Muhammad Hilmi

NIM : 11327105899

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 09 September 2019

Pembimbing skripsi,

FIRDAUS, S.H., MH

NIP: 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAMMAD HILMI**
 NIM : 11327105899
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa 10 Desember 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H. M.H.

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Asir, SHI., M.H.

Penguji II
Yafrinaldi S.H., M.A.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap dan bertindak laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut.

Namun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjaga netralitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, banyak di antara Aparatur Sipil Negara yang secara nyata mendukung salah satu calon, dengan cara mengikuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur, baheho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang secara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, yang sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia tersebut diimplementasikan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang tentang ASN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain adalah kepada pegawai ASN yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kepada yang bersangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, serta dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Desember 2019

MUHAMMAD HILMI
NIM. 11327105899



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, DEMOKRASI DAN POLITIK HUKUM	12
A. Aparatur Sipil Negara	12
B. Demokrasi	17
C. Politik Hukum	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	25
A. Implementasi	25
B. Pemilihan Umum	27
C. Negara Hukum	35
D. Netralitas	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	45
B. Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Nomor 7	
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	50
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara hukum senantiasa menjunjung tinggi asas demokrasi, dimana suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan, demi untuk terciptanya keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya bahwa kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Adapun pesta demokrasi yang dilakukan melalui bentuk pemilu tersebut telah dimulai sejak Tahun 1955, yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan September 1955 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan tahap kedua pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.¹

Dari sinilah gambarannya bahwa arti penting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tercermin dalam bentuk pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta ditambah dengan jujur dan adil. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari suatu negara yang memegang teguh konsep demokrasi.

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1993), h. 343

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dari pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, maka sistem pemilu yang dipilih adalah sistem proporsional. Sebagai alternatif dari sistem proporsional adalah sistem distrik, namun sejak dulu hingga kini sistem distrik masih merupakan perdebatan, baik di parlemen maupun di luar parlemen.

Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat persaingan antarpolisi dalam suatu pemilihan umum. Dan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.²

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang digunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk di sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.³

²M. Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu, Demokratisasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Cesindo, 1996), h. 31

³Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapan?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi di Indonesia, maka yang perlu diperbaiki adalah proses atau pelaksanaannya di lapangan, sistem pemilu apapun yang dipakai sebenarnya telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem yang mana pun yang akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh pilihan atas sistem tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.⁴

Ungkapan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa yang harus diperbaiki untuk pemilu yang akan datang adalah mekanisme yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemilu, sedangkan sistemnya menurut penulis dapat saja mempertahankan sistem yang telah ada.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa, Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa, Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dari beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. Dari asas ini maka netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sangat penting untuk dijaga dan diterapkan, pegawai Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan mendukung secara terang-terangan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak pilih hanya dapat diberikan pada saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap dan bertindak yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut.

Demikian juga halnya, bahwa Aparatur Sipil Negara harus loyal atau bersikap loyalitas, artinya sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konsisten kepada seseorang atau atasan atau kepada institusi. Dalam hal ini seorang ASN harus patuh dan taat kepada atasan yang berlaku dan mengikuti perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk harus netral dalam pemilihan umum.

Namun saat ini pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjaga netralitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, banyak di antara Aparatur Sipil Negara yang secara nyata mendukung salah satu calon, dengan cara mengikuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur, baleho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang secara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, yang sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh dengan melakukan penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan Judul Penelitian: **“IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian dan penulisan kajian ini penulis membatasi pada masalah yang berhubungan dengan keikutsertaan pegawai ASN dalam kampanye, secara nyata mendukung salah satu calon, ikut serta sebagai tim sukses, memasang gambar atau baliho dalam satu calon, yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.⁵

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.⁶ Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).⁷

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸

Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer,⁹ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁰ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 74

⁶Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h. 160

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 11

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 33

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142

¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum tata negara, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tersier,¹¹ yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta akibat hukum bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum tata negara, sesuai

¹¹*Ibid*, h. 143

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang demokrasi dan negara hukum.

Bab III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian pemilihan umum, netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), kebijakan, dan pengawasan.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari netralitas pegawai ASN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan akibat hukum bagi pegawai ASN yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bab V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum, khususnya hukum tata negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, DEMOKRASI DAN POLITIK HUKUM

A. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Dengan demikian, maka PNS/ASN adalah:

- a. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk menjamin netralitas, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.¹²

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada:

¹²Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, (Jakarta: Bantika, 2004), h.155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepastian hukum

Kepastian hukum, artinya penyelenggaraan, pembinaan dan pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Proporsionalitas

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara proporsionalitas artinya, dilakukan oleh suatu lembaga yang berkompeten dan berkualitas, dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika dan hukum.

- c. Profesionalitas

Pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara profesionalitas oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang sudah teruji dan dengan kinerja yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- d. Keterpaduan

Keterpaduan di sini artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas secara terpadu dan dalam satu tim yang dipimpin oleh seorang yang profesional dan menguasai di bidangnya.

- e. Delegasi

Delegasi artinya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan pendelegasian dari atasan atau pendelegasian dari aturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan dalam pendelegasian tersebut.

f. Netralitas

Netralitas artinya, bahwa Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak memihak kepada salah satu unsur atau golongan, termasuk dalam bidang politik. Aparatur Sipil Negara bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Efektif

Efektif artinya, pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus dapat berjalan secara efektif, artinya setiap pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

i. Efisien

Pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara harus efisien, artinya dengan proses yang cepat, tepat dan dengan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, dan tidak terkesan berlebihan dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Keterbukaan

Keterbukaan artinya bahwa semua pelaksanaan tugas-tugas Aparatur Sipil Negara dilakukan secara terbuka, dan dapat diketahui oleh publik dan tidak ada yang tertutup.

k. Nondiskriminatif

Nondiskriminatif artinya, bahwa dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, bahwa Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan melakukan pembedaan dan pelayanan yang berbeda terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

l. Persatuan dan kesatuan

Persatuan dan kesatuan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai ada perpecahan di antara pegawai maupun dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

m. Keadilan dan kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan maksudnya adalah, bahwa Aparatur Sipil Negara harus bersifat adil dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

n. Kesejahteraan

Kesejahteraan artinya bahwa Aparatur Sipil Negara senantiasa memperhatikan kesejahteraan di lingkungannya, dan kesejahteraan dalam keluarganya. Artinya Aparatur Sipil Negara harus dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tidak boleh menyimpang dari aturan yang sudah ditentukan. hal ini penting dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya.¹³

2. Tugas

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas sebagai pejabat publik, yang mana tugas tersebut diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing, dan dilakukan secara profesional dan dengan kualitas yang prima, serta dilakukan secara cepat dan tidak terkesan menunda waktu.

- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terutama yang berhubungan dengan

¹³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga stabilitas dalam masyarakat, dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

3. Peran

Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam hal ini Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran melaksanakan perencanaan tugas, pelaksanaan serta pengawasan tugas-tugas pemerintahan. Di samping itu Pegawai Aparatur Sipil Negara juga berperan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan harus menjaga hal-hal yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁵

B. Demokrasi

1. Pengertian

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi juga dikatakan sebagai bentuk pemerintahan sesuatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian besar

¹⁴Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini, walaupun masih sederhana, ciri tersebut sudah ditemui.¹⁶

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.¹⁷

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.¹⁸

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata

¹⁶Moh. Mahfud, MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 31

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 53

¹⁸*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Nilai yang Terkandung dalam Demokrasi

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

Demokrasi merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai dan musyawarah.

- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

Demokrasi dapat menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan proses pergantian pimpinan sesuai dengan masa jabatannya, dan proses pergantian pimpinan tersebut dilakukan secara damai dan teratur.

- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

Demokrasi juga sebagai alat yang dipergunakan untuk membatasi timbulnya kekerasan dalam proses musyawarah dan mufakat tersebut.

- e. Mengakui secara menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Demokrasi sebagai bentuk pengakuan bahwa perbedaan pendapat dan keanekaragaman itu merupakan sesuatu yang alami dan harus dijaga agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjamin tegaknya keadilan.¹⁹

Demokrasi juga sebagai alat untuk melakukan sesuatu dan mengambil kebijakan secara adil dan tidak merugikan pihak-pihak lain, dengan demokrasi diharapkan apa yang disepakati tersebut merupakan tindakan yang menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dapat dipahami, bahwa demokrasi merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, dan juga sebagai alat untuk melaksanakan proses pemerintahan secara transparan dan akuntabilitas.

3. Penyelenggaraan Demokrasi

Demokrasi diselenggarakan oleh beberapa lembaga, yaitu:

- a. Pemerintah yang bertanggungjawab.

Penyelenggaraan proses demokrasi dalam suatu negara dilakukan oleh pemerintahan yang sah dan bertanggungjawab, yang dalam pelaksanaan demokrasi tersebut dilakukan secara teratur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menggambarkan dan merupakan implementasi dari pelaksanaan

¹⁹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi, yang hasilnya dapat memilih wakil-wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.

Dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka diperlukan partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat, yang diwakili oleh wakilnya melalui partai politik.

- d. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

Sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu demokrasi, maka wartawan yang tergabung dalam pers dan media masa baik cetak maupun elektronik, diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan demokrasi tersebut.

- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Dalam pelaksanaan demokrasi diperlukan adanya lembaga peradilan yang berperan sebagai lembaga yang mengadili setiap perselisihan yang terjadi, baik dalam internal pemerintahan maupun dalam lembaga politik.

Dalam proses penyelenggaraan demokrasi, maka ada beberapa lembaga yang terlibat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut merupakan proses atau hasil dari demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Politik Hukum

Politik hukum adalah bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum difungsikan.²⁰

Perspektif politik hukum nasional pertama-tama dapat ditemukan di dalam kunci pokok pertama sistem pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penegasan kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.²¹

Secara sosiologis adanya politik hukum nasional memang menjadi keharusan segera setelah Indonesia merdeka, sebab dengan terjadinya kemerdekaan, secara revolusioner telah terjadi perubahan idealita dan realita masyarakat Indonesia. Jika sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif. Setelah kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat yang merdeka.

²⁰ Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 30

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan ini berimplikasi pada keharusan adanya perubahan berbagai aturan hukum yang telah dibuat pemerintah kolonial Belanda sebab hukum-hukum produk Belanda itu diletakkan pada landasan yang sudah sangat lain dengan idealita dan realita masyarakat Indonesia. Keharusan menyesuaikan antara produk hukum dengan gagasan struktur masyarakatnya ini disebabkan hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakatnya atau disebabkan hukum itu tidak berada disebuah vakum. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa begitu Indonesia merdeka, semua produk hukum peninggalan pemerintah Belanda yang tidak sesuai lagi dengan idealita dan realita masyarakat Indonesia harus segera dicabut.

Hukum adalah produk politik. Sebagai contoh tidak cocoknya lagi mengenai ketentuan atau materi hukum tentang Pemerintah Daerah dengan situasi politik yang ada saat itu. Tegasnya bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lahir dari semangat politik yang tidak demokratis karena program pembangunan yang berorientasi pada paradigma pertumbuhan, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat menyembunyikan watak sentralistiknya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 didesain untuk melayani atau sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang logika pembangunan ekonomi yang menghendaki sentralisasi kekuasaan untuk mengamankan program pembangunan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, jika kita sepakat bahwa dewasa ini kita telah berada pada era konfigurasi politik yang lebih demokratis di bawah jargon keterbukaan, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang lahir dari konfigurasi politik yang non-demokratis dapat dipandang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan revisi.

Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa sebuah politik hukum bukanlah bangunan yang statis, melainkan dapat berubah-ubah sesuai dengan fungsinya untuk melayani masyarakat. Jika politik sebagai sub-sistem kemasyarakatan yang lain harus pula berubah, sebab hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Inilah maknanya bahwa hukum merupakan produk politik, yang berarti bahwa karakter sebuah produk hukum akan selalu merefleksikan konfigurasi politik yang melahirkannya.²²

Dari gambaran di atas, bahwa politik hukum merupakan kebijakan dalam membentuk hukum atau mengganti hukum yang lama dengan yang baru, yang merupakan kebijakan pemerintah atau pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut.

²² Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 272



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Implementasi

1. Pengertian

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, atau suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi juga muara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²³

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang

²³ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yakni:

- Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.²⁴

Dari beberapa proses pelaksanaan tersebut dapat dipahami, bahwa implementasi itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang harus terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.²⁵

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- Kondisi lingkungan;
- Hubungan antar organisasi;
- Sumberdaya;

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Karakter instansi implementor.

Di samping itu ada beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses kebijakan, yaitu:

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
- b. Kecukupan input kebijakan.
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan .
- d. Kapasitas implementor.
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.
- f. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.²⁶

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²⁷

Melihat dari pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia, maka sistem pemilu yang dipilih adalah sistem proporsional. Sebagai alternatif dari sistem proporsional adalah sistem distrik, namun sejak dulu hingga kini sistem

²⁶*Ibid.*

²⁷Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distrik masih merupakan perdebatan, baik di parlemen maupun di luar parlemen.

Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat persaingan antarpolisi dalam suatu pemilihan umum. Dan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.²⁸

Sistem pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru adalah sistem perwakilan berimbang dengan sistem daftar (sistem proporsional), namun dalam pelaksanaannya partai politik peserta pemilu tidak mendapat peluang untuk berkompetisi, sehingga setiap pemilu Golkar terus mendominasi karena partai politik yang mendapat dukungan dan suntikan dari pemerintah. Sebagai konsekuensinya maka perwakilan yang duduk di parlemen tidak representatif dan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Apabila kita akan melaksanakan kebijakan politik secara baik, maka kebijakan yang dilakukan harus selalu mengarah kepada pemikiran tentang bagaimana demokrasi yang betul, jujur, adil dan sebagainya. Namun yang terjadi di Indonesia sebenarnya ada dua fenomena. Pertama, irasional. Karena banyak wacana politik, ketika mencapai tujuan tertentu, menghalalkan semua cara. Kedua, politik di Indonesia sudah terkait dengan penggunaan kekuasaan, antara lain ketika terjadi mobilisasi untuk mencapai tujuan, maka yang

²⁸ M. Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilihan Umum, Demokratisasi dan Pembangunan*, (Jakarta: Cidesindo, 1996), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan adalah kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kekuasaan ada di tangan, kita lupa ciri khas masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk di sini berarti bahwa kita butuh toleransi, tidak mungkin politik di Indonesia dibuat seragam, tidak bisa dibuat semacam penyatuan, dan tidak bisa dibuat menangnya sendiri.²⁹

Sebenarnya yang terjadi selama masa Orde Baru adalah kebijakan politik seperti yang digambarkan di atas. Sehingga partai politik yang ada dibuat harus mengikuti satu partai politik yang didukung oleh pemerintah. Keadaan ini dapat membuat hilangnya arti demokrasi yang sudah dicanangkan dalam konstitusi Indonesia.

Dari beberapa gambaran tentang persoalan yang telah terjadi di Indonesia, maka yang perlu diperbaiki adalah proses atau pelaksanaannya di lapangan, sistem pemilu apapun yang dipakai sebenarnya telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Berbagai sistem pemilu yang ada sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem yang mana pun yang akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh pilihan atas sistem tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.³⁰

²⁹ Mudji Sutrisno, *Demokrasi Semudah Ucapankah?*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 15

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga tahun 2001 dijelaskan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lengkapnya berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Secara lengkap, bunyi Pasal 22E tersebut adalah:

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- d. Peserta. pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat di DPR, dan dilaksanakan oleh lembaga independen dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan umum harus benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas-asas dalam Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan, bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Langsung

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh masyarakat tanpa perantara orang lain. Pelaksanaan pemungutan suara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara langsung oleh masyarakat yang berhak memilih di tempat pemungutan suara.

2. Umum

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara umum, artinya masyarakat yang berhak untuk memilih dapat datang ke tempat pemungutan suara tanpa kecuali.

3. Bebas

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara bebas, artinya pemilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Pemilih masuk ke bilik suara dan melaksanakan hak pilihnya secara bebas dan memilih sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya secara bebas.

4. Rahasia

Masyarakat sebagai pemilih dapat merahasiakan pilihannya kepada orang lain, dan orang lain tidak perlu mengetahui pilihan dari orang lain, dan ini merupakan rahasia dalam asas pemilihan umum.

5. Jujur

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, komisi pemilihan umum dilakukan secara jujur, artinya tidak ada penyimpangan terhadap hasil pemungutan suara yang dilakukan.

6. Adil

Penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini komisi pemilihan umum, Bawaslu, Panwaslu, dan panitia pemungutan suara harus berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adil terhadap setiap kontestan pemilu dan masyarakat selaku pemilih, dan tidak ada membedakan antara satu dengan yang lainnya.

3. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Umum

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

1. Mandiri

Penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu lembaga yang mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanpa campur tangan dari pihak pemerintah atau pihak manapun.

2. Jujur

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus jujur, artinya tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara hasil pemilihan umum.

3. Adil

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus dilakukan dengan adil, artinya tidak membedakan orang atau kontestan pemilu semua diberlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Berkepastian hukum

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

5. Tertib

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara teratur menurut tahapan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dan dilakukan secara teratur dan tertib.

6. Terbuka

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara terbuka, artinya terbuka untuk umum dan tidak ditutup-tutupi, setiap tahapan pemilihan umum dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak.

7. Proporsional

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara proporsional artinya, dilakukan oleh suatu lembaga yang berkompeten dan berkualitas, dan menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika dan hukum.

8. Profesional

Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh KPU, suatu lembaga pemilihan umum yang profesional yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang sudah teruji dan dengan kinerja yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Akuntabel

Semua tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan penggunaan anggaran harus jelas dan transparan diumumkan kepada publik secara akuntabel.

10. Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus dapat berjalan secara efektif, artinya setiap tahapan pemilihan umum tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

11. Efisien.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU harus efisien, artinya dengan proses yang cepat, tepat dan dengan anggaran yang sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, dan tidak terkesan berlebihan dan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Negara Hukum

1. Pengertian

Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.³¹

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika suatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.³²

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, (Jakarta: Eresco, 1981), h. 37

³² S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ciri-Ciri Negara Hukum

Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.³³

Berkenaan dengan hal ini, maka menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh rakyat secara demokratis melalui kemauan umum (*volonte generale*). Perlunya suatu kekuasaan dibatasi menurut seorang pujangga Inggris Lord Acton, bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Lahirnya keinginan untuk membatasi dan mengawasi kekuasaan negara, diiringi dengan lahirnya teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant dan Hans Kelsen. Menurut teori kedaulatan hukum, negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).³⁴

Sesuai dengan pernyataan di atas maka kontrol yang dilakukan oleh rakyat terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh aparat pemerintah harus sesuai dengan alam demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Artinya suara

³³ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 23

³⁴ S.F. Marbun, *Peradilan.....*, *Op Cit*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat harus senantiasa mendapat perhatian dari aparat pemerintah dalam mengeluarkan semua kebijakannya.

Apabila dalam mengeluarkan kebijakan tersebut terjadi kerugian bagi pihak rakyat maka perlu diadakan suatu lembaga yang dapat menilai bahwa perbuatan aparat pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun lembaga yang dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai lembaga peradilan yang bersifat bebas dan tidak memihak kepada siapapun, mengadili atas dasar hukum dan keadilan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Menyadari sepenuhnya peran positif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.³⁵

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, yang

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus merupakan pelaksana lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan maksud pembentukannya maka Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu urgensi diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan sebagai pengawasan intern terhadap pelaksanaan Hukum Administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu Negara Hukum. Akan tetapi harus benar-benar berfungsi sebagai badan peradilan yang secara bebas dan objektif diberi wewenang menilai dan mengadili pelaksanaan Hukum Administrasi Negara yang dilakukan oleh pejabat eksekutif.³⁶

Sesuai dengan falsafah Negara Pancasila, maka hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara juga sekaligus

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Gadjah Indonesia, 1996), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi hak-hak masyarakat secara luas dan menyeluruh yang berhubungan dengan Tata Usaha Negara.

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu dikedepankan, utamanya guna menghindari kemungkinan hukum dijadikan alat oleh penguasa untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa sendiri maupun kepentingan kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan rakyat.

D. Netralitas

Pegawai Negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat ketentuan asas netralitas terkait politik praktis seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Menjelang Pemilu para ASN harus dikumpulkan untuk diberitahu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitasnya.

Ada 16 (enam belas) larangan yang tidak boleh dilakukan ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu:

- a. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial yang dilakukan oleh ASN.
- b. Menghadiri deklarasi calon.
- c. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye.
- d. Ikut kampanye dengan atribut PNS.
- e. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menghadiri acara partai politik.
- g. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon.
- h. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- i. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP.
- j. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri sebagai ASN.
- k. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
 - l. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.
 - m. Mengerahkan PNS/ASN untuk ikut kampanye
 - n. Pendekatan ke Partai Politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain.
 - o. Menjadi pembicara atau narasumber dalam acara partai politik.
 - p. Foto bersama pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk dukungan atau keberpihakan.

Untuk mewujudkan netralitas ASN diharapkan dalam manajemen sistem kepegawaian perlu selalu ada:

1. Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS/ASN tidak perlu kuatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier.
2. Balas jasa yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan PNS/ASN beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan korupsi, baik korupsi jabatan maupun korupsi harta, menjadi berkurang, kalau tidak mungkin dihapuskan sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan, sehingga setiap PNS/ASN dapat memperkirakan kariernya dimasa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi.³⁷

Dengan melihat banyaknya masalah politisasi birokrasi yang tetap berlangsung, maka jelas tampak disini pentingnya untuk mengartikulasikan kembali tuntutan netralisasi birokrasi. Sebenarnya tuntutan seperti ini sudah pernah menghangat ketika muncul perdebatan mengenai rangkap jabatan seorang pejabat PNS/ASN, yang sekaligus sebagai pengurus atau anggota partai, hal ini jelas tidak dibenarkan dalam undang-undang.

Netralitas menempatkan aparatur dalam ruang yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik golongan tertentu, sehingga aparatur dapat bekerja memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Keinginan untuk menjadikan aparatur yang netral secara ekspilisit telah diterapkan dalam berbagai undang-undang.

Netralitas PNS/ASN juga merupakan konsekuensi dari perubahan politik dan reformasi di bidang perundang-undangan yang merupakan keinginan untuk membebaskan birokrasi pemerintahan dan birokrat dari persaingan, pertentangan, dan tarik menarik kepentingan antara partai-partai politik yang akan semakin meningkat dengan semakin demokratisnya sistem politik Indonesia.

Netralitas PNS/ASN yang diharapkan sejalan dengan demokratisasi, juga telah membawa pandangan bahwa birokrasi pemerintahan dan pegawai

³⁷Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Belantika, 2004), h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri harus bersifat netral dalam politik, artinya pegawai negeri tidak menjadi anggota/ pengurus partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik sebagai pendukung/simpatisan. Dengan demikian demokrasi pemerintah dan pegawai negeri berdiri di atas semua partai politik dan golongan.

Meskipun demikian sebagai warga negara, pegawai negeri tetap mempunyai hak politik berupa hak memilih dan dipilih. Netralitas PNS/ASN tidaklah berarti PNS/ASN buta politik dan tidak peduli dengan perkembangan politik. Sebagai aparatur negara, PNS harus memahami perkembangan politik yang terjadi, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh tarik menarik kepentingan politik yang ada.

Dalam memantapkan netralitas PNS/ASN, peranan pengawasan perlu ditingkatkan dan diharapkan mampu mengungkapkan sedini mungkin adanya penyimpangan peraturan yang berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas pegawai negeri, khususnya yang menyangkut keikutsertaan seorang pegawai negeri di bidang politik praktis.

Menyikapi masalah ini perlu dilakukan langkah, antara lain:

- a. Sosialisasi secara kontinyu terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas.
- b. Melakukan pembinaan kepada PNS/ASN mengenai pengetahuan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi PNS/ASN sebagai aparatur negara yang netral dan tidak diskriminatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peningkatan kesadaran jiwa korps PNS/ASN dan ditanamkan kepada setiap individu PNS/ASN.
- d. Peningkatan penegakan disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Netralitas PNS/ASN sebagai unsur aparatur negara terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan daerah, sesuai dengan kebijaksanaan politik negara yang dijalankan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dan pemerintahan.

³⁸*Ibid*, h. 157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia tersebut diimplementasikan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang tentang ASN.
2. Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain adalah kepada pegawai ASN yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kepada yang bersangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan

tingkatannya, serta dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selaku pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan tidak boleh terganggu oleh kegiatan politik di luar kantor atau di luar dinas, karena pegawai ASN tidak ada konsekuensinya apabila tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon, karena siapapun yang terpilih, maka pegawai ASN tetap sebagai pegawai dan tidak ada hubungannya dengan calon yang terpilih.
2. Kepada pegawai ASN harus dapat menjaga disiplin, kejujuran dan ketaatan sesuai dengan apa yang tercantum dalam daftar penilaian kinerja pegawai. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai ASN, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap disiplin pegawai maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintan R.Saragih, *Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia*, Perintis Press, Jakarta, 1995
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, ELBS and Sidgwich and Jackson Limited, London, 1996
- C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1996
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Susunan Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- _____, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Dahlan Thaib dkk, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Feisal Tamin, *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Belantika, Jakarta, 2004
- Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruktif Reformasi Hasil Pemilu 1999*, Unas Press, Jakarta, 2001
- Ibrahim R dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- M.Dawam Rahardjo, *Sistem Pemilu, Demokratisasi dan Pembangunan*, Cidesindo, Jakarta, 1996
- Mariam Budiardjo, *Dasa-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1998
- Mariam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Moh. Kusnardy dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1993
- Moh. Mahfud. MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- _____, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, UII Press, Jakarta, 1999

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998

_____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999

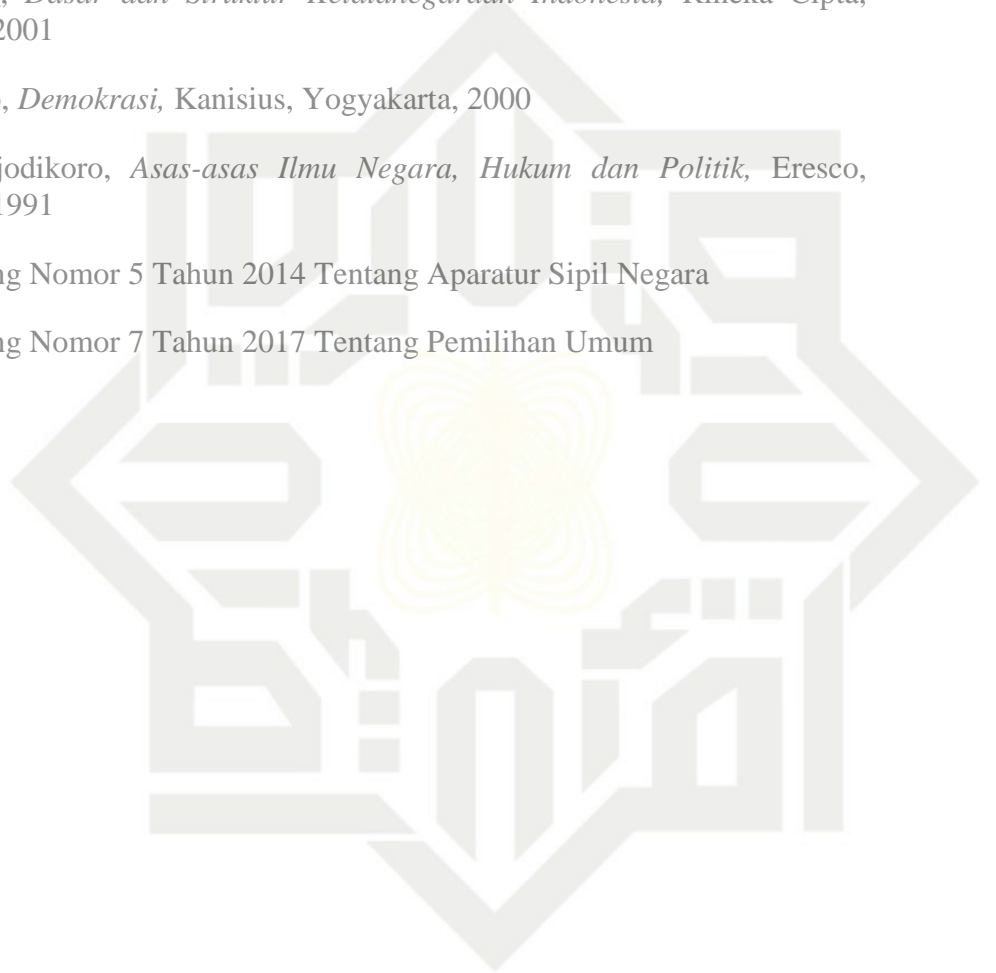
_____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Mudji Sutrisno, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara, Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM*, yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Hilmi**
NIM : 11327105899
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Januari 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
oni Alizon, S.H., M.H.

Penguji I
Basir, SHI., M.H.

Penguji II
yafrindi, SH., M.A.

Kepala Subbagian
Adm. Umum dan Keuangan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Eri Surianto, SH.I
NIP. 19670218 199303 1 006

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

MUHAMMAD HILMI

11327105899

ILMU HUKUM

*Implementasi Netralitas Apratur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*

Firdaus, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2020

Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Prinsipnya, dengan judul "implementasi netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan undang – undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum", ditulis oleh saudara :

: MUHAMMAD HILMI

: 11327105899

: ILMU HUKUM

: kamis / 25 JULI 2019

: LOVELLY DWINA DAHEN, S.H, M.H

Tela diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 agustus 2019
Narasumber,

LOVELLY DWINA DAHEN, S.H, M.H
NIP. 198206222011012006

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ERNI, S.Sos., MM
NIP. 19680226199102002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NAMA LENGKAP MUHAMMAD HILMI lahir di SUNGAI TONANG, 17 APRIL 1993 merupakan anak KELIMA dari TUJUH bersaudara dari pasangan HAMALIR dan ZAHARIA yang bertempat tinggal di Desa SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPA UTARA Kabupaten KAMPAR. Jenjang pendidikan penulis. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPAR Kabupaten KAMPAR (2001-2006). Sekolah Menengah Pertama (MTSN) MTS N SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPAR Kabupaten KAMPAR (2006 – 2009). Sekolah Menengah Atas (MADRASAH ALIYA) MADRASAH ALIYA PLUS SUNGAI TONANG Kecamatan KAMPAR UTARA Kabupaten KAMPAR (2009-2012). Selanjutnya Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di terima pada Fakultas SYARIAH DAN HUKUM Jurusan ILMU HUKUM.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas SYARIAH DAN HUKUM 1, penulis melaksanakan Program Pengalaman MAGANG di KANTOR PENGACARA DI BANGKINANG Kabupaten BANGKINANG dari Bulan Januari-Februari. Kemudian melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan LUBUK Kota Kecamatan LUBUK ROKAN HULU dari Bulan Juli-Agustus.

Selanjutnya puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi penulis dengan judul “IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (” disetujui untuk dapat diujikan dalam sidang Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana HUKUM (SH) pada Jurusan ILMU HUKU Fakultas SYARIAH DAN HUKUM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.